

**INTENTION OF SECTOR INFORMAL COMMUNITY TOWARD
THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM
IN HULU SUNGAI UTARA DISTRICT**

Rusmiati¹, Fatwa Sari Tetra Dewi², Retna Siwi Padmawati³

ABSTRACT

Background: Population of Hulu Sungai Utara District who have no health insurance in 2014 is large enough or about 47.49% with a number of self-paid participants in the National Health Insurance is only 0.82%. Most of them are working in the informal sector. Intention of the community, especially people who work in the informal sector need to be excavated related to the Universal Coverage in 2019. The study used Theory of Planned Behavior to predict intention by attitude, subjective norm and perceived behaviour control.

Method : The study was a correlational study using cross sectional design. The sample determined with Consecutive Sampling on 148 respondents. Collecting data using questionnaires gained from elicitation study and test-try questionnaires. Data analysis has used Pearson Correlation and multiple linier regression test.

Results : Respondents had positive attitude, subjective norm and perceived behavioral control on intention of the informal sector community in the Hulu Sungai Utara District toward the National Health Insurance program. Significant relationship between intention with attitude (*p-value* = 0,000, *r* = 0,728), subjective norm (*p-value* = 0,000, *r* = 0,750) and perceived behaviour control (*p-value* = 0,000, *r* = 0,328). Influence of each variable based on regression coefficients obtained by the equation intention toward National Health Insurance = -6,370 + 0,223 attitude + 0,429 subjective norm + 0,141 perceived behaviour control. *Adjusted R Square* value 0,674 indicates 67,40% change of intention influenced by attitude, subjective norm and perceived behaviour control.

Conclusion : There is a significant relationship between attitude, subjective norm and perceived behaviour control to the intention informal sector community toward the National Health Insurance. Subjective norm has the larges positive influences to the intention compared with attitude and perceived behaviour control. Governments need to make efforts and strategies to improve the coverage of the National Health Insurance in Hulu Sungai Utara District particularly for the informal sector.

Keywords : Intention, Sector Informal Community, Theory of Planned Behavior and National Health Insurance.

-
1. Postgraduate Student of KPMK, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada.
 2. Lecturer in Public Health Science, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada.
 3. Lecturer in Public Health Science, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada.

KESIAPAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENUJU INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Putu Astri Dewi Miranti¹, Ambar Widaningrum², Julita Hendrartini³

ABSTRAK

Latar Belakang : Indonesia mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) dengan dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 dan mengharuskan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Provinsi Bali untuk segera berintegrasi. Kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyiapkan strategi dan kebijakan terbaik dalam proses integrasi JKBM ke dalam JKN sangat dibutuhkan agar proses ini dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat Bali.

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dengan mengidentifikasi strategi dan tahapan menuju kebijakan integrasi program JKBM ke dalam program JKN di Provinsi Bali.

Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif, dilakukan di Provinsi Bali. Subyek penelitian berjumlah 32 orang, yaitu perencana, pembuat dan pelaksana kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat peserta jaminan kesehatan yang ditentukan secara sengaja. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) melalui panduan wawancara mendalam serta panduan FGD. Analisis data dilakukan dengan pendekatan “*grounded theory*” secara sistematis dari proses transkrip hingga analisis.

Hasil : Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan kesepakatan bersama untuk dalam menyiapkan proses integrasi JKBM ke dalam JKN dengan kegiatan dan anggaran yang tersedia di masing-masing pelaksana teknis. Ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan pendukung proses integrasi ini mencerminkan telah ada komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung kebijakan integrasi JKBM ke dalam JKN. Kendala penyiapan kebijakan integrasi adalah belum disusunnya regulasi tentang integrasi, keterbatasan kemampuan anggaran beberapa kabupaten serta masyarakat Bali yang masih nyaman dengan JKBM dan masih berharap subsidi premi sepenuhnya dari pemerintah.

Kesimpulan : Pemerintah Provinsi Bali belum siap untuk mengintegrasikan program JKBM ke dalam JKN pada tahun 2015 dan 2016 karena belum adanya regulasi dan dukungan dari masyarakat Bali. Strategi dan langkah-langkah menyiapkan integrasi sudah dilakukan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Kunci : Kesiapan Pemerintah, Integrasi, JKBM, JKN, Regulasi, Kesepakatan

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM
3. Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM